

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2021 banyak daerah di Indonesia yang mengalami naik turun kinerja keuangan pemerintah daerahnya yang dikarenakan adanya pengeluaran belanja daerah yang berdampak minim untuk daerah nya, dan juga banyak nya kepala daerah yang melakukan korupsi, sehingga menimbulkan total belanja daerah atau pengeluaran suatu daerah melebihi batas wajar sehingga terjadinya penurunan kinerja suatu daerah (Mulyani, 2021).

Kinerja keuangan yang rendah dapat ditingkatkan dengan mengikuti Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diperbaharui dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Zuraya, 2020). Hal ini guna untuk mengurangi terjadinya pengeluaran belanja daerah yang berlebihan dengan minim dampak untuk daerahnya (Zuraya, 2020).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2020) daerah yang telah menerapkan UU No 23 Tahun 2014 dapat menunjukkan hasil kinerja keuangan daerah yang telah ter alokasikan dengan baik. Dengan begitu pemerintah dapat terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya agar menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya dalam pembuatan keputusan. Untuk dapat melihat bagaimana hasil kinerja keuangan daerah berjalan baik atau tidak, dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja (Jumingan, 2006).

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai salah satu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu aktivitas kerja yang dilaksanakan dan dengan hasil yang dicapai dari aktivitas, proses, unit organisasi (Prasetyanto, 2022). Sehingga diperlukannya pengukuran kinerja untuk melihat bagaimana kinerja suatu aktivitas, berjalan dengan baik atau tidak (Prasetyanto, 2022).

Kinerja keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah berjalan apabila jika hasil kinerja keuangan baik maka pertumbuhan ekonomi akan naik (Halim, 2012). Berikut

adalah data grafik pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pulau – pulau di Indonesia beserta kontribusinya:

Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dan Kontribusi Pulau Di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Dari data pada gambar diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia berada di Pulau Maluku-Papua, akan tetapi Pulau Maluku-Papua bukanlah pusat perekonomian Indonesia (Kacaribu, 2022). Sehingga menghasilkan kontribusi yang sedikit yaitu 2,49%. Kontribusi tertinggi berada di Pulau Jawa, walaupun untuk pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa berada dibawah Pulau Maluku-Papua yaitu 3,66%.

Struktur ekonomi di Indonesia secara garis besar masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki kontribusi lebih banyak terhadap Produk Domestik Bruto sekitar 80% (Suhariyanto, 2021). Namun pada tahun 2020, Pulau Jawa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,51%, dan Sumatera mengalami penurunan minus 1,19% (Suhariyanto, 2021).

Pulau Sumatera mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Pulau Jawa yang merupakan sebagai pusat ekonomi Indonesia. Sedangkan Pulau Sumatera bukan penopang ekonomi, dengan kondisi beberapa daerah desa yang masih tertinggal dibandingkan Pulau Jawa (Suhariyanto, 2021).

Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera per Provinsi tahun 2010-2021:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera 2010-2021

Tahun	Aceh	Sumut	Sum Bar	Riau	Jambi	Sum Sel	Beng Kulu	Lam Pung	Kep. Babel	Kep. Riau
2010	2.74	6.42	5.94	4.21	7.35	5.63	6.1	5.88	5.99	7.19
2011	4.84	6.63	6.26	5.04	8.54	6.5	6.46	6.43	6.5	6.66
2012	5.14	6.22	6.38	3.54	7.44	6.01	6.6	6.53	5.73	6.82
2013	4.18	6.01	6.18	2.61	7.88	5.98	6.21	5.97	5.29	6.13
2014	1.55	5.23	5.88	2.71	7.36	4.79	5.48	5.08	4.67	6.6
2015	-0.73	5.1	5.53	0.22	4.21	4.42	5.13	5.13	4.08	6.02
2016	3.29	5.18	5.27	2.18	4.37	5.04	5.28	5.14	4.1	4.98
2017	4.18	5.12	5.3	2.66	4.6	5.51	4.98	5.16	4.47	1.98
2018	4.61	5.18	5.14	2.35	4.69	6.01	4.97	5.23	4.45	4.47
2019	4.14	5.22	5.01	2.81	4.35	5.69	4.94	5.26	3.32	4.83
2020	-0.37	-1.07	-1.62	-1.13	-0.44	0.11	-0.02	-1.67	-2.3	-3.8
2021	2.79	2.61	3.29	3.36	3.66	3.58	3.24	2.79	5.05	3.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung 2010-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2010 hingga tahun 2021, dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5.05%. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang sebesar 2.34% dari PDRB Pulau Sumatera sebesar 3.18% pada tahun 2021. Diketahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2020 mengalami kontraksi 2.30%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2020 menuju 2021 mengalami peningkatan sebesar 7.35%. Dengan demikian data pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 – 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021):

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2021

Tahun	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Pangkalpinang
2010	5,37	5,53	4,37	4,61	5,97	4,43	6,07
2011	6,91	5,93	5,51	6,01	6,42	6,12	6,79
2012	5,35	6,09	5,49	5,02	4,7	6,05	6,11
2013	5,3	5,96	5,1	4,21	4,45	5,69	5,78
2014	4,78	4,72	4,3	1,52	4,4	5,1	4,27
2015	4,54	4,53	5,03	0,31	4,27	4,4	4,24
2016	4,63	4,96	4,8	3,05	4,3	4,25	5,17
2017	5,04	5,3	5,26	3,45	4,57	4,85	5,19
2018	4,51	5,37	5,19	3,41	4,52	4,21	5,07
2019	2,93	3,42	7,13	1,25	2,61	3,35	3,34
2020	-0,73	-2,31	-5,42	-2,87	-2,01	-0,65	-3,01
2021	7,48	5,64	0,25	4,76	3,67	4,56	9,25
Rata-rata	4,68	4,60	3,92	2,89	3,99	4,36	4,86

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010–2021 menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan setiap kabupaten dan kota yang memiliki nilai tertinggi sebesar 4,86% pada Kota Pangkalpinang. Nilai rata-rata terendah sebesar 2,89% pada Kabupaten Bangka Tengah.

Pada Tabel 1.2 di tahun 2010-2019 nilai pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai yang stabil. Diketahui pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi *covid-19*. Akan tetapi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung mampu mengalokasikan APBD nya dengan baik (Oktarizal, 2022). Sehingga dapat dianalisa apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik, dan dapat mempengaruhi pertumbuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut Halim (2004) ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan data dari APBD yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Sedangkan menurut Mulyadi (2007) untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan rasio kemandirian, ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio efisiensi. Banyak peneliti – peneliti terdahulu yang meneliti terkait dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio – rasio tersebut.

Rasio Kemandirian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber dana luar (eksternal), semakin tinggi tingkat persentase rasio kemandirian suatu daerah, menandakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan dari pihak luar (pemerintah pusat) semakin rendah (Harjowiryo, 2011). Rasio kemandirian juga dapat menggambarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Harjowiryo, 2011). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaksanakan oleh Astuti (2015), Arnaldi dan Yusra (2019) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Putri *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hasil penelitian dari Saragih dan Siregar (2020), Masnila, *et al* (2013), dan Kumpangpune *et al* (2019) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Ketergantungan Keuangan adalah suatu ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerahnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan diukur dengan rasio antara PAD dengan total pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya subsidi atau Dana Perimbangan (Halim, 2004). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaksanakan oleh Arnaldi dan Yusra (2020) menunjukkan

bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal itu sejalan dengan hasil penelitian dari Purnawati (2019) yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Tiara (2016) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif signifikan dan penelitian dari Manueke (2020) menunjukkan hasil bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih tergolong sedang, dikarenakan rata-rata rasionya yang masih berada di interval $>50\% - 75\%$.

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah rasio yang menunjukkan ukuran tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah nya. Rasio desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (Mahmudi, 2007). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaksanakan oleh Arnaldi dan Yusra (2019) menunjukkan hasil bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian dari Putri *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan. Sedangkan hasil penelitian dari Manueke (2020) dan Purnawati (2019) menunjukkan bahwa hasil dari rasio desentralisasi fiskal masih berpengaruh negatif signifikan

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menunjukkan untuk menggambarkan bagaimana perbandingan antara besarnya biaya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang diterima (Halim, 2004). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaksanakan oleh Arnaldi dan Yusra (2020) menunjukkan hasil negatif yaitu bahwa rasio efisiensi sangat tidak efisien, hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Saragih dan Siregar (2020) yang menunjukkan hasil bahwa rasio efisiensi sangat tidak efisien dan dikatakan buruk. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nurlita *et al* (2018) yang menunjukkan hasil bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yulianah (2017) yang

menunjukkan hasil bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Keserasian Belanja Tak Langsung adalah rasio yang menggambarkan bagaimana cara pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin serta Belanja Pembangunannya secara baik dengan membandingkan total Belanja Tak Langsung terhadap total Belanja Daerah (Halim, 2012). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh rasio keserasian belanja tak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaksanakan oleh Fidelius (2013) menunjukkan hasil bahwa rasio keserasian belanja tak langsung berpengaruh positif signifikan hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Susanti *et al* (2022). Sedangkan hasil penelitian dari Saragih dan Siregar (2020) dan Sartika (2019) menunjukkan hasil bahwa rasio keserasian belanja tak langsung berpengaruh negatif.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021 menempati peringkat pertama pada keseluruhan provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerahnya untuk mengelola keuangan dengan tepat. Pada pengelolaan keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja tak langsung.

Dengan demikian berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Arnaldi dan Yusra (2019) dan Yulianah (2017), undang-undang dan data yang ada menjadikan bahan pertimbangan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah atas keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengalokasikan anggaran yang tersedia dengan menambahkan variabel independen berupa rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja tak langsung dan tahun penelitian yaitu 2010-2021. Hal tersebut menjadikan dasar peneliti menganalisis berdasarkan judul penelitian yaitu **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan**

Ekonomi (Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, maka adapun pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Kemandirian PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apakah Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
4. Apakah Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
5. Apakah Rasio Keserasian Belanja Tak Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
6. Apakah rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja tak langsung, berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris apakah Rasio Kemandirian PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Menguji secara empiris Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menguji secara empiris Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menguji secara empiris Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Menguji secara empiris Rasio Keserasian Belanja Tak Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Menguji secara empiris variabel rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja tak langsung berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan APBD yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus Kepulauan Bangka Belitung) diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja tak langsung dan rasio keserasian belanja langsung khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang pendidikan di tingkat SMA dan Kuliah di mata pelajaran Akuntansi Ekonomi dan Akuntansi Pemerintahan pada pembahasan pokok mengenai APBN dan APBD.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam laporan penelitian ini adalah manfaat yang bisa secara langsung didapat oleh pihak terkait dalam penelitian ini adalah peneliti, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

- a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengambilan keputusan serta mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Bagi Masyarakat agar mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja tak langsung dan rasio keserasian belanja langsung dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja tak langsung dan rasio keserasian belanja langsung.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

